

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim, maka diperlukan “*Triple Bottom Line approach*” yang mengkaji kegiatan usaha dan keberlangsungan usaha tidak hanya dari aspek finansial namun juga aspek sosial dan lingkungan (Desai et al., 2022). *Triple Bottom Line* adalah kerangka akuntansi yang menggabungkan tiga dimensi kinerja: sosial, lingkungan, dan keuangan (Slaper & Hall, 2011). Pada tahun 1992, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menetapkan inisiatif yang berfokus pada pengurangan gas rumah kaca (GRK) di atmosfer untuk mengatasi masalah meningkatnya kerusakan sumber daya alam dan dampaknya, seperti "pemanasan global". Selain itu, Protokol Kyoto, yang membatasi emisi karbon sesuai standar negara maju, mulai berlaku pada Februari 2005.

Berdasarkan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi Kementerian ESDM Tahun 2020, pemerintah Indonesia berkomitmen memerangi perubahan iklim dengan meratifikasi Perjanjian Paris berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Melalui inisiatif ini, Indonesia dan negara-negara lain berkomitmen untuk bekerja sama mencegah kenaikan suhu sebesar 1,5°C dibandingkan suhu pra-industri dan memantau kenaikan suhu global hingga di bawah 2°C. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Perjanjian Paris melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan mengendalikan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Peraturan ini

tampaknya menunjukkan bahwa penerapan langkah-langkah untuk mengurangi emisi CO₂ sangat penting untuk mencapai nol emisi (Tsuroyya & Ratmono, 2024).

Terdapat contoh kasus yang memperlihatkan bagaimana emisi karbon dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan, yaitu adanya peran *corporate governance* di dalamnya. Kasus yang dimaksud adalah PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang berencana untuk membangun PLTU baru. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Adaro Energy Indonesia Tbk, sempat terjadi kericuhan yang dikarenakan adanya seorang pemegang saham menolak rencana pembangunan PLTU batu bara baru di Kalimantan Utara untuk smelter aluminium perusahaan. Pemegang saham tersebut mengatakan bahwa Adaro harus menunjukkan niat transisi yang serius dengan beralih dari bisnis batu bara dan investasi yang lebih agresif ke sektor energi terbarukan. Adaro sendiri mengklaim akan melakukan transisi energi. Hal ini terlihat dari tema laporan keuangan mereka, “*Transforming into a bigger and greener Adaro*”. Namun realita yang terjadi, produksi batu bara Adaro meningkat hampir 20 persen dari 52,7 juta ton menjadi 62,8 juta ton pada 2021, dan menargetkan kenaikan produksi pada tahun 2023. Smelter Adaro ini rencananya akan memproduksi 500 ribu ton aluminium setiap tahun. Dengan asumsi PLTU tersebut menggunakan teknologi yang terbaik saat ini yaitu ultra super critical, maka PLTU ini diprediksikan akan menghasilkan emisi 5,2 juta ton CO₂ ekuivalen per tahunnya. Hal itu bertentangan dengan semangat transisi energi. Ketergantungan Adaro atas bisnis batu bara memiliki risiko yang sangat tinggi bagi para investor perusahaan ini. Laporan IEEFA menyatakan saat ini lebih dari 200 lembaga keuangan telah memiliki kebijakan pembatasan investasi batu bara. Dari sektor perbankan seperti DBS, Standard Chartered, dan OCBC telah menyatakan tidak akan terlibat dalam pembiayaan ke Adaro (CNN Indonesia,

2023). Dengan adanya pernyataan dari sektor perbankan tersebut, mengakibatkan munculnya permasalahan pada kinerja keuangan Adaro karena pendanaan yang didapatkan akan mengalami penurunan.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban Perseroan tersebut wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi. Sebagai pedoman teknis kewajiban pelaporan keberlanjutan, pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan pelaporan keberlanjutan yang ditetapkan pemerintah, perusahaan tidak hanya diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi juga wajib melaporkan kegiatan yang bertanggung jawab tersebut. Sementara itu, perusahaan yang kegiatan usahanya tidak terkait dengan sumber daya alam diatur oleh OJK melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik juga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan guna melengkapi laporan tahunan perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Menurut PT ESGI Indonesia Berkelanjutan, perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* pada tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan. Perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* pada 2018 ada 58 perusahaan, pada 2019 ada 94 perusahaan, dan pada 2020 ada 140 perusahaan. Jadi, BEI memiliki peran penting dalam memfasilitasi praktik berkelanjutan di kalangan

perusahaan yang terdaftar, serta pentingnya pengungkapan informasi lingkungan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap masalah lingkungan.

Meskipun ada peningkatan dalam pengungkapan informasi lingkungan, masih ada perdebatan dan ketidakpastian tentang apakah upaya perusahaan dalam mengurangi emisi karbon benar-benar berdampak positif atau negatif terhadap kinerja keuangan mereka. Ada penelitian yang menyatakan bahwa emisi karbon mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap akuntansi serta kinerja keuangan berbasis pasar pada perusahaan terpilih (Desai et al., 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak buruk emisi lebih parah terjadi pada industri-industri yang sensitif terhadap lingkungan (misalnya batu bara, listrik dan energi), sedangkan pada sektor-sektor yang tidak sensitif, hubungannya negatif namun secara statistik tidak signifikan. Di Afrika Selatan, berdasarkan data 63 perusahaan untuk satu tahun fiskal (2015), menyimpulkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari emisi karbon terhadap kinerja keuangan (Ganda & Milondzo, 2018). Namun, ada juga penelitian yang telah mempelajari pengaruh peraturan peringkat lingkungan hidup terhadap kinerja perusahaan-perusahaan Indonesia, yang menyimpulkan bahwa kinerja lingkungan belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Sarumpaet, 2005). Di Malaysia, terdapat studi yang menyimpulkan bahwa emisi gas rumah kaca (GHG) meningkatkan kinerja keuangan perusahaan Malaysia, sementara partisipasi dalam *Carbon Disclosure Project* (CDP) justru menurunkannya, menunjukkan perlunya keseimbangan antara tanggung jawab lingkungan dan keuntungan finansial (Vaicondam et al., 2025). Dengan demikian, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara emisi karbon perusahaan dan kinerja keuangan

mereka, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memoderasi hubungan tersebut, seperti yang akan dieksplorasi dalam penelitian yang diusulkan.

Dalam konteks ini, peran *corporate governance* menjadi krusial. Menurut BEI, *Corporate governance* (CG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan (BEI, n.d.). CG adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, mencakup hubungan antara dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Cadbury, 1992). Pada Perusahaan, CG dapat memainkan peran penting dalam menangani isu-isu lingkungan, termasuk emisi karbon (Wahyuningrum et al., 2025). Struktur *governance* yang memungkinkan keragaman perspektif, keahlian, dan kapasitas pengawasan yang lebih besar cenderung mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam isu lingkungan, termasuk pengungkapan emisi karbon (Nasih et al., 2019). Namun, bisa juga dewan komisaris lebih konservatif, fokus pada kepentingan finansial atau mitigasi risiko reputasi sehingga kurang mendorong keterbukaan terhadap isu lingkungan seperti emisi karbon (Ummah & Setiawan, 2021). Meskipun pentingnya CG diakui, masih ada kekurangan pemahaman tentang bagaimana CG secara spesifik memengaruhi hubungan antara emisi karbon dan kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi peran CG dalam konteks ini dan bagaimana hal itu dapat memoderasi hubungan antara emisi karbon dan kinerja keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran CG sebagai pemoderasi dalam hubungan antara emisi karbon dan kinerja keuangan, dengan fokus khusus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan melakukan

penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana CG mempengaruhi hubungan antara emisi karbon perusahaan dan kinerja keuangan. Hal ini tidak hanya akan memberikan wawasan baru tentang isu-isu lingkungan dan keuangan, tetapi juga akan membantu memperkaya pemahaman kita tentang peran CG dalam konteks bisnis berkelanjutan. Maka, pentingnya penelitian ini dilakukan dan dampak potensialnya dalam menyediakan wawasan baru tentang hubungan antara emisi karbon, kinerja keuangan, dan CG dalam konteks perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya rencana pembangunan PLTU batu bara oleh Adaro menyebabkan sektor perbankan seperti DBS, Standard Chartered, dan OCBC telah menyatakan tidak akan terlibat dalam pembiayaan ke Adaro. Selain itu, akibat lainnya adalah adanya seorang pemegang saham yang menolak rencana pembangunan PLTU batu bara baru ini. Permasalahan pada Adaro ini menunjukkan bahwa emisi karbon memiliki dampak yang besar dan CG memiliki peran penting. Emisi karbon dapat berdampak pada kinerja keuangan Adaro karena pendanaan yang didapatkan akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah emisi karbon perusahaan berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah *corporate governance* mempengaruhi hubungan antara emisi karbon perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan antara emisi karbon dan kinerja keuangan.
2. Mengidentifikasi peran *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi.
3. Menyediakan wawasan yang berguna bagi praktisi bisnis, pengambil keputusan, dan regulator terkait tentang bagaimana emisi karbon perusahaan dapat memengaruhi kinerja keuangan, serta bagaimana *corporate governance* dapat memoderasi hubungan ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dengan mengungkap hubungan antara emisi karbon dan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta peran moderasi dari *corporate governance*. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman tentang dampak lingkungan terhadap kinerja ekonomi perusahaan dalam konteks pasar berkembang. Dengan menambahkan bukti empiris dari Indonesia, penelitian ini membantu mengisi kesenjangan dalam literatur global dan memperkaya teori yang ada mengenai tanggung jawab lingkungan dan tata kelola perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam mengelola emisi karbon dan meningkatkan

kinerja keuangan melalui praktik *corporate governance* yang baik. Hasil penelitian dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan dan efektif dalam mengurangi emisi karbon. Bagi investor, penelitian ini menyediakan informasi penting yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan kinerja lingkungan dan tata kelola perusahaan. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik, serta mendorong tanggung jawab lingkungan di sektor bisnis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka terdiri dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel, rumus variabel penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, analisis data, serta uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini menjelaskan hasil penelitian, hasil analisis data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian bab ini menjelaskan Kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

